

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 33.a TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi penataan kearsipan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal 1

(1) Maksud Pengklasifikasian Arsip adalah untuk menggolongkan naskah berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dengan menggunakan kode-kode.
(2) Tujuan pengkodean Pengklasifikasian Arsip adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip secara mudah, cepat dan tepat.

Pasal 2

(1) Pola klasifikasi kearsipan disusun berdasarkan kelompok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah.
(2) Pola klasifikasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode-kode yang berbentuk numerik.
(3) Pedoman pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pedoman pola klasifikasi digunakan untuk mengklasifikasikan arsip pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kearsipan melaksanakan pembinaan penyelenggaran kearsipan di Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 24 April 2019 M
19 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 24 April 2019 M
19 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 33.a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 33.a TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

000 UMUM

000 Umum

001 Lambang
- .1 Garuda
- .2 Bendera Kebangsaan
- .3 Daerah
  - .1 Propinsi
    - .1 Bendera Aceh
    - .2 Hymne Aceh
  - .2 Kabupaten

002 Tanda Kehormatan/penghargaan untuk Pegawai Lihat 861.1
- .1 Bintang
- .2 Satyalencana
- .3 Satyakarya Nugraha
- .4 Penghargaan Secara Adat
- .5 Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)
- .6 Monumen

003 Hari Raya/Besar
- .1 Nasional (17 Agustus,Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb)
- .2 Hari Raya Keagamaan
- .3 Hari Ulangtahun/HUT (Hari jadi Provinsi/Kabupaten/Kota)
- .4 Hari-hari Besar Internasional

004 Ucapan
- .1 Terimakasih
- .2 Selamat
- .3 Belasungkawa
- .4 Ucapan lainnya

005 Undangan

006 Tanda Jabatan
- .1 Pamong praja
- .2 Pejabat lainnya
- .3 Tanda Pengenal

010 URUSAN DALAM

011 Gedung kantor/termasuk Instalasi prasarana fisik
- .1 Listrik
- .2 Telepon
- .3 Otomasi

.4 Air Minum

.5 Hidrant

.6 Alarm

.7 Internet

012 Rumah Dinas

.1 Tanah untuk Rumah Dinas

.2 Perabot Rumah Dinas

.3 Rumah Dinas Golongan I

.4 Rumah Dinas Golongan II

.5 Rumah Dinas Golongan III

.6 Rumah/Bangunan Lainnya

.7 Rumah Pejabat Negara

013 Akomodasi/Persinggahan (mess/wisma/hotel)

014 Rumah Susun/Apartemen

015 Peminjaman sarana dan prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, Laptop, dll)

016 Pengurusan Kendaraan Dinas

017 Keamanan/Ketertiban Kantor

018 Kebersihan Kantor

019 Protokol

.1 Upacara Bendera

.2 Tata Tempat

.1 Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden

.3 Audiensi/menghadap Presiden (Pimpinan)

.4 Alamat - alamat kantor dan Pejabat

.5 Bandir/Umbul - umbul/Spanduk

.6 Penerimaan Tamu

020 BARANG DAN JASA

021 Penawaran

.1 Penawaran Barang

.2 Penawaran Jasa

022 Barang

.1 Barang Bergerak (Alat Angkutan)

.2 Barang Tidak Bergerak (ATK, Mesin Kantor dan Perabot Kantor)

023 Jasa

024 Pakaian Dinas

025 Senjata

027 Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukkan lelang, dsb.

.1 Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/ anwijzing, negosiasi, evaluasi

.2 SPK, Kontrak/Amandemen/Addendum, Teguran

.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

.4 Serah terima pekerjaan

.5 Pemeriksaan pekerjaan

.6 Perpanjangan waktu/force majoure

.7 Denda

.8 Sanggahan

.9 Pemeliharaan barang/jasa

028 Inventaris

.1 Pendataan Barang Milik Negara

.2 Pemeliharaan Barang Milik Negara

.3 Penghapusan Barang Milik Negara

030 KEKAYAAN DAERAH

031 Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)

032 Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen/bangunan bersejarah, dll)

033 Tanaman

034 Alat-alat berat

035 Hewan

036 Barang persediaan dalam gudang

037 Alat pengangkut (Darat, Laut, Udara)

038 Peralatan Pabrik, Laboratorium

039 Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)

040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI

041 Perpustakaan

.1 Pameran Bahan Perpustakaan

.2 Pengolahan (Katalog, Bibliografi)

.3 Sirkulasi/Layanan

.1 Keanggotaan

.2 Peminjaman dan pengembalian

.4 Deposit

.5 Pemeliharaan, Pelestarian/Alih Media

.6 Pembinaan Perpustakaan

.1 Bantuan Buku, Rak

.7 Penghapusan/Penyusutan Bahan Perpustakaan

.8 Jenis - jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, keliling, Masyarakat)

.9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar perpustakaan

.10 Taman Bacaan Masyarakat

042 Dokumentasi

043 Kunjungan ke Perpustakaan

045 Kearsipan

.1 Pola Klasifikasi

.2 Akuisisi Arsip

.3 Penyusutan Arsip

.1 Jadwal Retensi Arsip

.2 Penilaian Arsip

.3 Pemindahan Arsip

.4 Penyerahan Arsip

.5 Pemusnahan Arsip

.6 Berita Acara Penyusutan Arsip

.7 Daftar Pencarian Arsip

.4 Pembinaan Kearsipan

.1 Pengawasan (sistem)

.2 Bimbingan Kearsipan (SDM)

.5 Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip

.1 Fumigasi dan Termit Control

.2 Laminasi

.3 Alih Media

.6 Layanan

.7 Pemasyarakatan

.1 Pameran

.2 Penerbitan Naskah Sumber Arsip

.3 Sosialisasi Kearsipan

.8 Pengembangan Sistem

.1 Sistem Kearsipan

.2 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

.9 Pengawetan

046 Sandi

047 Telegram, Telex, Radio, ISB

048 Data Elektronik

050 PERENCANAAN

Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar kementrian, Musrenbangnas, dan Musrenbangdes, Forum SKPD

.1 RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

.1 RENSTRA (Rencana Strategis)

.2 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

.3 RENSTRA BAPPEDA

.2 Program Nasional

.1 RKP (Rencana Kerja Pembangunan)

.2 RKA - KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga)

.3 RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)

.4 Rencana Kerja SKPD

.5 KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)

.6 Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi

.7 Nota Keuangan

.8 RKT (Rencana Kerja Tahunan)

.9 RKO (Rencana Kerja Operasional)

.3 Repelita

.1 Pelita Daerah

.2 Bantuan Pembangunan Daerah

.3 Beppeda

051 Laporan

.1 Laporan berkala

.2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

052 Evaluasi

.1 Evaluasi Rencana Strategis

053 Proyek Bidang Pemerintahan

.1 Bidang Politik

.2 Bidang Keamanan dan Ketertiban

.3 Bidang Kesejahteraan Rakyat

.4 Bidang Perekonomian

.5 Bidang Pekerjaan Umum

.6 Bidang Pengawasan

.7 Bidang Kepegawaian

.8 Bidang Keuangan

060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN

.1 Program Kerja

061 Organisasi Instansi Pemerintah (Struktur Organisasi)

.1 Susunan dan Tata Kerja

.2 Tata tertib kantor, jam kerja dibulan puasa

062 Organisasi Badan Non Pemerintah

063 Organisasi Badan Internasional

064 Organisasi semi pemerintah, BKS - Aksi

065 Ketatalaksanaan

.1 Tata Naskah Dinas

.2 Stempel dinas dan stempel jabatan

.3 Papan nama instansi pemerintah/non pemerintah

.4 Alamat-alamat kantor dan pejabat

.5 Ketentuan pakaian dinas dan atribut

066 Tata Hubungan Kerja

067 Standart Operasional Prosedur

068 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan

069 Analisis Jabatan

.1 Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan Struktual dan Fungsional

.2 Uraian Jabatan

070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

071 Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset

072 Pengembangan

.1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)

.2 SINAS (Sistem Inovasi Nasional)

.3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi, Cluster, Kab/Kota, desa, inovatif

.4 Inkubator Teknologi dan Bisnis

.5 Pameran produk inovasi/Ristek

.6 BTC (Bisnis Teknologi Center)

.7 Raptek (Penerapan Iptek)

.8 HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)

073 Kajian

.1 Kajian Strategis/Diskusi/Forum Group Discussion (FGD)

.2 Seminar

.3 Workshop

.4 Rapat Koordinasi/Rapat Teknik

.5 Lokakarya

.6 Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian

074 Kerjasama Penelitian

.1 Instansi Pemerintahan Pusat/Daerah

.2 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

.3 Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat

.4 Lembaga Internasional

075 Perekayasaan

076 Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)

077 Publikasi Ilmiah

.1 Jurnal Ilmiah

080 KONFERENSI/RAPAT KOORDINASI

081 Gubernur

082 Bupati/Walikota

083 Komponen Eselon Lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)

084 Instansi lainnya (diluar Kemendagri)

085 Internasional di Dalam Negeri

086 Internasional di Luar Negeri

090 PERJALANAN DINAS

091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah

092 Perjalanan Menteri ke Daerah

093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)

094 Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas

095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah

096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri

097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri

098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri

099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

101 GDN (Gerakan Disiplin Nasional)

110 PEMERINTAHAN PUSAT

111 Presiden, Meliputi pencalonan,pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan

.1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR

.2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato

112 Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan

113 Susunan Kabinet

.1 Reshuffle

.2 Penunjukan Menteri ad intern

.3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, Lihat 500.1

114 Kementrian Dalam Negeri

115 Kementrian Lainnya

116 Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)

117 Lembaga Non Kementrian

118 Otonomi Daerah/Desentralisasi/Dekonsentrasi

119 Kerjasama antar Kementrian

120 PEMERINTAH PROVINSI

.1 Kebijakan Pemerintah Provinsi

.2 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)

.3 Monografi, tambahkan kode wilayah

.4 Koordinasi

.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah

.2 Instansi Vertikal

.3 Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri

121 Gubernur, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb

122 Wakil Gubernur, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb

123 Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan

124 Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida

125 Pembentukan/Pemekaran

.1 Pembentukan Daerah Otonom

.2 Pembentukan Wilayah

.3 Perubahan Batas Wilayah

.4 Pemekaran Wilayah

.5 Permasalahan Batas Wilayah

.6 Pemindahan Ibukota Provinsi

.7 Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah, Jalan

126 Pembagian Wilayah

127 Penyerahan Urusan

128 Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah

130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota

.2 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati/Walikota (LKPJ)

.3 Monografi

.4 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

.5 Koordinasi

.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah

.2 Instansi vertikal

.3 Kerjasama antar provinsi/Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)

131 Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb

.1 Sambutan/Pengarahan/Amanat

132 Wakil Bupati/Walikota, meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan, berita acara serah terima jabatan dan sebagainya

133 Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan

134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, Meliputi Muspida

.1 Musppida

.2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)

.3 Forum Koordinasi Lainnya

.4 Kerjasama Antar Kabupaten/Kota

135 Pembentukan Daerah/Pemekaran Wilayah

.1 Pembentukan Daerah Otonom

.2 Pembentukan Wilayah

.3 Perubahan Batas Wilayah

.4 Pemekaran Wilayah

.5 Permasalahan Batas Wilayah

.6 Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota/pembentukan

.7 Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah, Jalan

136 Pembagian Wilayah

137 Penyerahan Urusan

138 Pemerintah Wilayah Kecamatan

.1 Pembentukan Kecamatan

.2 Pemekaran Kecamatan

.3 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan

.4 Pemindahan Ibu kota Kecamatan

.5 Laporan Kecamatan

.6 Sambutan/Pengarahan/Amanat

.7 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren

139 Pemerintahan Mukim

.1 Imum Mukim

Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, pemberhentian dan sebagainya

140 PEMERINTAHAN DESA/GAMPONG

141 Pamong Desa, meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dan sebagainya

.1 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kepala Desa

.2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Gampong (APBDes/APBG)

.1 Penghasilan pamong desa/gampong dll

143 Kekayaan Desa/Gampong atau nama lain

144 Dewa tingkat desa/gampong Tuha Peut, Tuha Lapan, Dewan Marga rembug desa/gampong atau nama lain

145 Administrasi Desa/gampong : Monografi, Peta Rupa Bumi dll

146 Kewilayahan

.1 Pembentukan Desa/Kelurahan

.2 Pemekaran Desa/Kelurahan

.3 Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan

.4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan

.5 Permasalahan Batas Desa/Kelurahan

.6 Penyatuan Desa/Kelurahan

.7 Penghapusan Desa/Kelurahan

.8 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan

147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa/Gampong atau nama lain

148 Perangkat Desa/Gampong

.1 Kepala Desa/Gampong atau nama lain

.2 Sekretaris Desa/Gampong atau nama lain

.3 Staff Desa/Gampong atau nama lain

149 Dewan Desa/Gampong

.1 Dusun

.2 Jurong atau nama lain

150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD

151 Keanggotaan MPR

.1 Pencalonan

.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah

.3 Pemberhentian

.1 Recall

.2 Meninggal

.4 Pelanggaran

.5 Penggantian Antar Waktu

152 Keanggotaan DPR
- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- .3 Pemberhentian
  - .1 Recall
  - .2 Meninggal
- .4 Pelanggaran
- .5 Penggantian Antar Waktu

153 Keanggotaan DPD
- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah

154 Persidangan

155 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
- .2 Penghargaan

156 Hak

157 Jawaban Pemerintah

158 Peninjauan/Kunjungan Lapangan

159 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi

160 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

161 Keanggotaan
- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- .3 Pelanggaran
- .4 Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu
  - .1 Meninggal Dunia
  - .2 Mengundurkan Diri
  - .3 Diberhentikan
- .5 Alat Kelengkapan Dewan
  - .1 Pimpinan
  - .2 Badan Musyawarah
  - .3 Komisi
  - .4 Badan Legislasi Daerah
  - .5 Badan Anggaran
  - .6 Badan Kehormatan
  - .7 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)

162 Persidangan
- .1 Rapat - rapat
  - .1 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
  - .2 Rapat Pimpinan DPRD

.3 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus

.4 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi

.5 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum

.6 Rapat Fraksi

.2 Fraksi

.3 Tata Tertib

.4 Kode Etik

.5 Reses

.6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan

.7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi

163 Kesejahteraan

.1 Keuangan

.2 Penghargaan

164 Hak

165 Sekretaris DPR Provinsi

170 DPRD KABUPATEN/KOTA

171 Keanggotaan

.1 Pencalonan

.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah

.3 Pelanggaran

.4 Pemberhentian Antar waktu

.1 Meninggal Dunia

.2 Mengundurkan Diri

.3 Diberhentikan

.5 Alat Kelengkapan Dewan

.1 Pimpinan

.2 Badan Musyawarah

.3 Komisi

.4 Badan Legislasi Daerah

.5 Badan Anggaran

.6 Badan Kehormatan

.7 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)

172 Persidangan

.1 Rapat - rapat

.1 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa

.2 Rapat Pimpinan DPRD

.3 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus

.4 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi

.5 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum

.6 Rapat Fraksi

.2 Fraksi

.3 Tata Tertib

.4 Kode Etik

.5 Reses

.6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan

.7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi

173 Kesejahteraan

.1 Keuangan

.2 Penghargaan

174 Hak

175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota

180 HUKUM

.1 Konstitusi

.1 Dasar Negara

.2 Undang - undang dasar

.3 Undang - undang

.4 Peraturan Pemerintah

.5 Keppres/Perpres/Inpres

.6 Kepmen/Permen/Inmen

.7 Perundangan Tingkat Provinsi meliputi : Perda, Kepgub /Pergub/Ingub

.8 Perundangan Tingkat Kabupaten meliputi : Perda, Kepbup/Kepwal/PerBup/PerWal

.9 Perundangan Tingkat Desa meliputi : Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa

.2 Tap MPR

.3 Konvensi

181 Perdata

.1 Tanah

.2 Rumah

.3 Utang/Piutang

.1 Gadai

.2 Hipotik

.4 Notariat

182 Pidana
- .1 Tindak Pidana Hukum
- .2 Tindak Pidana Khusus
- .3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

183 Peradilan
- .1 Jenis - jenis Peradilan
  - .1 Peradilan Umum
    - .1 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
    - .2 Peradilan Tinggi
    - .3 Mahkamah Agung
  - .2 Peradilan Agama Islam
    - .1 Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
    - .2 Peradilan Tinggi Agama Islam
    - .3 Mahkamah Islam Agung
  - .3 Peradilan Militer
    - .1 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
    - .2 Mahkamah Militer Tinggi
    - .3 Mahkamah Militer Agung
  - .4 Peradilan Tata Usaha Negara
    - .1 Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama
    - .2 Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
    - .3 Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
  - .5 Peradilan Tindak Pidana Korupsi
  - .6 Peradilan Hak Asasi Manusia
  - .7 Mahkamah Konstitusi
  - .8 Komisi Yudisial
  - .9 Ombutsmen
- .2 Upaya Hukum
  - .1 Banding
  - .2 Kasasi
  - .3 Derden Verset
  - .4 Peninjauan Pembeli
  - .5 Grasi, Amnesti, Abolisi
- .3 Eksekusi
- .4 Pembinaan Hukum, meliputi kadarkum
- .5 Bantuan Hukum, meliputi LBH

184 Hukum Internasional

185 Imigrasi
- .1 Visa
- .2 Paspor

.3 Exit
.4 Reentry
.5 Lintas Batas/Batas Antar Negara

186 Kepenjaraan
.1 Registrasi Narapidana
.2 Pembinaan Narapidana
.3 Pembebasan Narapidana
.4 Tahanan Titipan

187 Kejaksaan
.1 Penuntutan Umum
.2 Penuntutan Khusus

188 Hukum Adat
.1 Tokoh Adat/Masyarakat

189 Peraturan Perundang - undangan
.1 MPR
.2 Undang - undang
.3 Peraturan TAP
.1 Peraturan Pemerintah
.2 Peraturan Menteri
.3 Peraturan Lembaga Non Departemen
.4 Peraturan Daerah
.1 Peraturan Provinsi
.2 Peraturan Kabupaten/Kota
.4 Keputusan
.1 Presiden
.2 Menteri
.3 Lembaga Non Departemen
.4 Gubernur
.5 Bupati/Walikota
.5 Instruksi
.1 Presiden
.2 Menteri
.3 Lembaga Non Departemen
.6 Standar Operasional Prosedur

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

191 Perwakilan Asing

192 Tamu Negara

193 Kerjasama Diplomatik Dengan Negara Asing
.1 ASEAN
.2 Bantuan Luar Negeri/Hibah

194 Perwakilan RI Diluar Negri

195 PBB

196 Laporan Luar Negeri

200 POLITIK

201 Perencanaan Dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri

.1 Pembinaan Dan Pemahaman Ideologi Negara

.2 Kesatuan Bangsa

.3 Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri Termasuk Laporannya

.4 Keadaan Politik Luar Negeri

.5 Evaluasi Dan Pegawasan Pembinaan Ipoleksosbut hankam

.6 Orde Baru

.7 Orde Reformasi

202 Kebijaksanaan Umum

210 KEPARTAIAN

211 Partai politik

.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL

.2 Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL

.3 Pembinaan PARPOL

.4 Hasil Munas/Musda PARPOL

.5 Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL

.6 Data Inventaris Dan Keuangan PARPOL

212 Partai/Organisasi Terlarang

.1 Keputusan Pembubaran Partai/Organisai Terlarang

.2 Daftar Dan Data Pengurus Anggota Partai/Organisai Terlarang

.3 Ijin Meninggalkan Tempat/Domisili Bagi Anggota Partai/ Organisasi

.4 Daftar Berkala Mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisasi Terlarang

.5 Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisai Terlarang

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

221 Pembentukan Organisasi

.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi

.3 Program Kerja Organisasi

.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota

222 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
223 Berdasarkan Perjuangan
.1 Perintis Kemerdekaan
.2 Angakatan 45
.3 Veteran
224 Berdasarkan Kekayaan
.1 PEPABRI
.2 Wredatama
225 Berdasarkan Kerohanian
226 Lembaga Adat

230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL

231 Pembentukan Organisasi
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
.3 Program Kerja Organisasi
.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
232 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
233 Ikatan Dokter Indonesia
234 Persatuan Guru Republik Indinesia
235 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
.1 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
236 Persatuan Advokat Indonesia
237 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
238 Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya
.1 Persatuan Advokat Indonesia
.2 Korps Pegawai Republik Indonesia
239 Jabatan Fungsional Lain
.1 Arsiparis
.2 Pustakawan

240 ORGANISASI PEMUDA

241 Pembentukan Organisasi
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
.3 Program Kerja Organisasi
.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota

242 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
243 Komite Nasional Pemuda Indonesia
244 Organisasi Mahasiswa
245 Organisasi Pelajar
246 Gerakan Pemuda Ansor
247 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
248 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)

250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN

251 Pembentukan Organisasi
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
.3 Program Kerja Organisasi
.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
252 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
253 Federasi Buruh Seluruh Indonesia
254 Organisasi Buruh Internasional
255 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
256 Keluarga Supir Proporsional Seluruh Indonesia (SPSI)
257 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia

260 ORGANISASI WANITA

261 Pembentukan Organisasi
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
.3 Program Kerja Organisasi
.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
262 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
263 Dharma Wanita
264 Persatuan Wanita Indonesia
265 Pemberdayaan Perempuan (wanita)
266 Kongres Wanita

270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM) PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)

271 Pencalonan

272 Nomor Urut/Tanda Gambar

273 Kampanye

.1 Dana Kampanye

274 Petugas Pemilu

275 Pemilih/Daftar Pemilih

276 Sarana

.1 TPS

.2 Kendaraan

.3 Surat Suara

.4 Kotak Suara

277 Pemungutan Suara/Perhitungan Suara

278 Hasil Pemilu

.1 Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif

.2 Penetapan pemenang pilkada

.3 Pengambilan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD

279 KPU/KPUD

280 PENGAWASAN PEMILU/PILKADA

281 Pemantauan

282 Pelanggaran

283 Sengketa

284 Panwaslu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

.1 Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan

.2 Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan

.3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman

.4 Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan

301 Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)

302 Pengawasan Trantibum

303 Penegakan Pelaksanaan Perda

304 Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda

305 Patroli Wilayah

306 Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing

.1 Pengamanan

.2 Pengawalan

307 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan

310 PERTAHANAN

311 Darat

312 Laut

313 Udara

314 Ketahanan Bangsa

315 Katahanan Ekonomi

316 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

320 KEMILITERAN/TNI

321 Latihan Militer

322 Wajib Militer

323 Operasi Militer

324 Kekayaan TNI

.1 AMD

325 Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

330 KEAMANAN

331 Kepolisian

.1 Polisi Pamong Praja

332 Huru-Hara/Demonstrasi

333 Senjata Api/Tajam

334 Bahan Peledak

335 Perjudian

336 Surat-surat Kaleng

337 Pengaduan Masyarakat

338 Himbauan atau Larangan

340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

.1 Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas

341 Pembinaan dan Diklat

.1 Pengangkatan/Pemberhentian anggota Linmas

.2 Pendidikan/latihan Linmas

.3 Pelatihan PAM Swakarsa

.4 Pendidikan/Latihan MENWA

342 Pengerahan dan pengendalian Linmas

343 Kesejahteraan bagi anggota Linmas

.1 Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas

.2 Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas

.3 Santunan uang duka bagi anggota Linmas

.4 Penghargaan bagi anggota Linmas

344 Data Linmas, MENWA, PAM Swankarsa
.1 Linmas Lanjut Usia
345 Orientasi Kesadaran Bela Negara
346 Kegiatan Pelaksanaan Linmas

350 KEJAHATAN

351 Makar/Pemberontakan/Terorisme
352 Pembunuhan
353 Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
354 Subversi/penyelundupan/Narkotika
355 Penipuan dan Pemalsuan
356 Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan
357 Kekerasan pada perempuan dan anak
.1 Pelaporan
.2 Penanganan Korban
358 Kenakalan
359 Kejahatan lainnya (traficking, hipnotis, dll)

360 BENCANA

.1 Pelatihan
.2 Surat Keputusan
.3 Berita Acara
361 Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
362 Banjir/Tanah Longsor
363 Angin Topan
364 Kebakaran
.1 Pemadam Kebakaran
365 Kekeringan
366 Posko Bencana
367 Koordinasi/Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
368 MOU Pemerintah Pusat BNPB

370 KECELAKAAN

371 Latihan SAR
372 Latihan Ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
373 Pelatihan managemen bagi pejabat
374 Satkorlak dan Satlak PBP
375 Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
376 Latihan Ketrampilan pemadam kebakaran
377 Kecelakaan Darat, Laut, Udara
378 Investigasi/Penyelidikan Kecelakaan
379 Asuransi kecelakaan

380 PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

381 Perencanaan
- .1 Perencanaan Teknis
- .2 Rekomendasi

382 Bantuan Bencana

383 Penanggulangan Bencana dengan pihak lain

384 Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi

385 PUSDALOPS

386 Kunjungan lapangan

387 Relawan

388 Laporan Bencana

390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

391 Instansi pemerintah Pusat

392 Instansi pemerintah di daerah

393 Lembaga International

394 Lembaga non pemerintah nasional

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

401 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat

402 Keluarga Miskin

410 PEMBANGUNAN DESA/GAMPONG

411 Gotong Royong
- .1 Swadaya Gotong Royong
  - .1 Pembinaan
  - .2 Pungutan
- .2 Lembaga Sosial Daerah (LSD)
- .3 Latihan Kerja Masyarakat
- .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- .5 Penyuluhan Masyarakat Desa
- .6 Kelembagaan Desa
- .7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

412 Perekonomian Desa
- .1 Produksi Desa
  - .1 Pengolahan
  - .2 Pemasaran
- .2 Pembiayaan Pembangunan Desa
  - .1 Inventarisasi Data
  - .2 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
  - .3 Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan

.4 Bantuan/Stimulasi/ADD

.5 Perkreditan Desa

.6 Pelaporan

.7 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM - MP)

.3 Koperasi Desa

.1 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)

.2 Koperasi Unit Desa (KUD)

.4 Keuangan

.1 Perkreditan Desa

.2 Inventarisasi Data

.3 Perkembangan/Pelaksanaan

.4 Bantuan/Stimulans

.5 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan

.5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa

.1 Pusat

.2 Daerah

.6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa

.1 Bantuan Langsung

.2 Bantuan Keserasian

.3 Bantuan Juara Lomba Desa

413 Sarana dan Prasarana Desa

.1 Prasarana Desa

.1 Pembinaan

.2 Bimbingan Teknis

.2 Pemukiman Kembali Penduduk

.1 Lokasi

.2 Diskusi

.3 Pelaksanaan

.3 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa

.1 Rumah Sehat

.2 Proyek Perintis

.3 Pelaksanaan

.4 Pengembangan

.5 Perbaikan Kampung

.4 Perbaikan Kampung

.5 Teknologi Tepat Guna (TTG)

.6 Masyarakat Pradesa

.1 Pembinaan

.2 Penyuluhan

414 Pengembangan Desa

.1 Tingkat Perkembangan Desa

.1 Jumlah Desa

.2 Pemekaran Desa

.3 Pembentukan Desa Baru

.4 Evaluasi

.5 Bagan

.2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)

.1 Penyuluhan Program

.2 Lokasi UDKP

.3 Pelaksanaan

.4 Bimbingan/Pembinaan

.5 Evaluasi

.3 Tata Desa

.1 Inventarisasi

.2 Penyusunan Pola Tata Desa

.3 Aplikasi Tata Desa

.4 Pemetaan

.5 Pedoman Pelaksanaan

.6 Evaluasi

.4 Perlombaan Desa dan Kelurahan

.1 Pedoman

.2 Penilaian

.3 Kejuaraan

.4 Piagam

.5 Pemukiman Kembali Penduduk

.1 Lokasi

.2 Diskusi

.3 Pelaksanaan

.6 Masyarakat Pradesa

.1 Pembinaan

.2 Penyuluhan

.7 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa

.1 Rumah Sehat

.2 Proyek Perintis

.3 Pelaksanaan

.4 Pengembangan

.5 Perbaikan Kampung

415 Koordinasi

.1 Sektor Khusus

.2 Rapat Koordinasi

.3 Tim Koordinasi Pusat

.4 Kerjasama

.1 Luar Negeri

.2 Perguruan Tinggi

.3 Kementrian/Lembaga Pemerintah

.4 Lembaga Lainnya

420 PENDIDIKAN

.1 Pendidikan Khusus

.2 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan

.3 Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dan sebagainya

.4 Pendidikan Kemasyarakatan

421 Sekolah (termasuk akreditasi)

.1 Pra sekolah (PAUD, Playgroup)

.2 Sekolah Dasar

.3 Sekolah Menengah

.4 Sekolah Kejuruan

.5 Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)

.6 Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum

.7 Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata,widyawisata, lomba - lomba (LKS, Olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran pelajar

.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa

.9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf

422 Administrasi Sekolah

.1 Persyaratan masuk sekolah, testing ujian, OSPEK

.2 Tahun Pelajaran

.3 Hari Libur

.4 Uang sekolah, diantaranya SPP, SPI

.5 Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi

.6 Ijazah, Sertifikat

.7 Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)

423 Metode Belajar

.1 Kuliah

.2 Ceramah, Simposium, Seminar

.3 Diskusi

.4 Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL

.5 Kurikulum

.6 Karya Tulis, Karya Ilmiah

.7 Ujian

424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, Guru/dosen berprestasi)

.1 Pertukaran Guru ke Luar Negeri

.2 Sertifikasi Guru

425 Sarana Pendidikan

.1 Bangunan Pendidikan

.1 Gedung Sekolah

.2 Kampus

.3 Pusat Kegiatan

.4 Perpustakaan

.5 Laboratorium

.2 Buku

.3 Perlengkapan Pendidikan

.4 Sistem Informasi Pendidikan

.5 Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan

426 Keolahragaan

.1 Pembina keolahragaan

.1 Olahraga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)

.2 Olahraga Pendidikan (POPDA SD, Porseni Dll)

.3 Olahraga rekreasi/massal (Senam, Sepeda Santai, Olahraga tradisional)

.4 Iptek dan Industri Olahraga

.5 Sarana dan Prasarana Keolahragaan

.2 Pesta Olahraga

.3 Kemitraan Olahraga

.4 KONI

427 Kepemudaan

.1 Pertukaran Pemuda

.2 Paskibraka

.3 Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja

.4 Kemitraan Pemuda

.5 Karang Taruna

428 Kepramukaan/kepanduan

429 Pendidikan Kedinasan Untuk Departemen Dalam Negeri

430 KEBUDAYAAN

.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan

.1 Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)

.2 Pekan Kebudayaan Aceh Timur (PKAT)

.2 Pembinaan Bidang Kebudayaan

431 Kesenian

.1 Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)

.2 Sarana

.1 Gedung Kesenian

432 Kepurbakalaan

.1 Museum

.2 Peninggalan kuno

.1 Candi, termasuk pemugaran

.2 Benda

433 Sejarah

434 Bahasa

435 Usaha Pertunjukan, hiburan, kesenangan

436 Penghayat Kepercayaan

440 KESEHATAN

.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan

441 Pembinaan Kesehatan

.1 Gigi

.2 Mata

.3 Jiwa

.4 Kanker

.5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

.6 Perawatan

.7 Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu dll

.8 Kesehatan Ibu dan Anak

.9 JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)

.1 JAMKESMAS

.2 JAMKESDA

.3 JAMPERSAL

.4 Jaminan Lainnya

.10 Pekan Imunisasi Nasional

442 Obat - obatan

.1 Pengadaan

.2 Pemeriksaan Obat

.3 Penyimpanan Obat

.4 Distribusi Obat

.5 Pengawasan Obat

.1 Obat Generik

.2 Obat Terlarang

.3 Pemalsuan Obat

443 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit

.1 Pencegahan Penyakit

.2 Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML)

.1 Kusta

.2 Kelamin, HIV, AIDS, IMS

.3 Frambusia

.4 TBC

.5 Kholera

.6 SARS dan Jenis Penyakit Lainnya

.3 Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)

.1 Malaria

.2 Dengue Haemorraghuie Fever (DHF), DBD

.3 Filaria

.4 Serangga

.5 Rabies

.6 Antrak

.7 Leptosirosis

.8 Chikungunya

.9 Penyakit lainnya

.4 Pemberantasan dan pencegahan penyakit tidak menular

.1 A. Pektoris

.2 IMA (Irama Mastcmik Akut)

.3 Hipertensi

.4 Stroke

.5 Diabetes Melitus

.6 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A. Serviks

.7 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A. Mammae

.8 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A. Hepar

.9 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A. Paru dan penyakit Lainnya

.5 Epidemiology dan Karantina (Epidka)

.1 Imunisasi

.2 Serveilanse

.3 Pestisida

.4 Pencemaran Udara

.5 Jamban Keluarga

.6 Kesehatan Institusi

.6 Higiene Sanitasi

.1 Tempat - tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), Jasa Boga

.2 Sarana air minum

.3 Pestisida, insektisida

.4 Pencemaran

.5 Jamban Keluarga, sanitasi rumah tangga

.6 Kesehatan Institusi, Misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll

.7 Higiene sanitasi C.A. Mammae

.8 Higiene sanitasi C.A. Hepar

.9 Higiene sanitasi C.A. Paru

.7 Kejadian Khusus

.1 Dekopensatiokordosis (Serangan Jantung)

.2 Asma

.3 Psikosis

.4 PPOM

.5 Kecelakaan Lalu Lintas

.6 Kejadian Luar Biasa (KLB)

444 Gizi dan Pengawasan Makanan

.1 Kekurangan Makanan

.2 Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Buruk

.3 Keracunan Makanan

.4 Menu Makanan Rakyat

.5 Badan perbaikan gizi daerah

445 RSU, RSJ, RS Khusus

.1 Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)

.1 Rawat Inap

.2 Rawat Jalan

.3 IGD

.4 IBS

.5 ICU

.6 MCU (Medical Check Up)

.2 Penunjang Medis

.1 Farmasi

.2 Rekam Medik

.3 Radiologi

.4 Gizi
.5 Laboratorium Klinik
.6 Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
.7 CSSD/Laundry
.3 Keperawatan
.4 Komite Medik
.5 SPI (Satuan Pengawas Internal)
.6 Mutu Rumah Sakit
.1 Akreditasi
.2 ISO
.3 PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
.4 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
.7 IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
.8 Promosi Layanan Kesehatan
.9 Kasus Hukum Rumah Sakit

446 Tenaga Medis
.1 Perencanaan Tenaga Medis
.2 Pendayagunaan Tenaga Medis
.1 Perijinan untuk Tenaga Medis
.2 Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
.3 TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
.3 Diklat Tenaga Kesehatan/Medis
.4 Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis
.5 Pendidikan di bidang kesehatan termasuk pendidikan spesialis

447 Peralatan kesehatan
.1 Standarisasi
.2 Penyimpanan
.3 Distribusi
.4 Perijinan berkaitan dengan alat kesehatan

448 Pengobatan Alternatif
.1 Pijat
.2 Akupuntur
.3 Jamu dan Herbal
.4 Dukun

449 Lembaga penyedia layanan kesehatan
.1 PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
.2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
.3 Rumah Bersalin
.4 Posyandu

.5 Laboratorium Kesehatan

.6 Apotik

.7 Sanatorium Kesehatan

450 AGAMA

.1 Kebijakan dan program pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan

.2 Bantuan dibidang keagamaan

451 Islam

.1 Peribadatan, Pensyahadatan

.1 Shalat

.2 Zakat, Infaq, Sedekah

.3 Puasa

.4 Umroh dan Haji

.5 MTQ

.2 Rumah Ibadah (Masjid, Mushala, Menasah)

.3 Tokoh Agama

.1 Pembinaan sumber daya tenaga keagamaan

.4 Pendidikan Agama

.1 Pendidikan Tinggi Agama

.2 Menengah, MTs, MA

.3 Dasar, Pra Sekolah, MI

.4 Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren/Dayah dll)

.1 Pemberdayaan santri/usaha ekonomi dayah

.2 Manajemen pengasuhan

.3 Pembinaan Sumber Daya Manusia

.5 Sarana Pendidikan meliputi Buku, gedung sekolah dll

.6 Tenaga Pengajar/Teungku Dayah

.7 Dakwah dan Syiar

.1 Aliran sesat

.2 Gampong percontohan syariat islam

.8 Organisasi lembaga pendidikan pesantren / dayah

.5 Harta Agama, Wakaf, Baitul Mal dsb

.1 Hibah

.6 Peradilan/pelanggaran syariat

.7 Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia/Majelis Permusyawaratan Ulama)

.8 Mazhab

.9 Fatwa Ulama

452 Kristen Protestan
- .1 Peribadatan
- .2 Rumah Ibadah Gereja dll
- .3 Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
- .4 Mazhab Agama Kristen Protestan
- .5 Organisasi Gerejani

453 Khatolik
- .1 Peribadatan
- .2 Rumah Ibadah Gereja dll
- .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pastur
- .4 Mazhab Agama Khatolik
- .5 Organisasi Gerejani

454 Hindu
- .1 Peribadatan
- .2 Rumah Ibadah Pura dll
- .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- .4 Mazhab Agama Hindu
- .5 Organisasi Agama Hindu

455 Budha
- .1 Peribadatan
- .2 Rumah Ibadah Candi, Vihara dll)
- .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- .4 Mazhab Agama Budha
- .5 Organisasi Agama Budha

456 Urusan Haji
- .1 ONH
- .2 Manasik

457 Kerukunan umat beragama

458 Aliran sesat lainnya

460 SOSIAL

461 Rehabilitasi Penyandang Cacat
- .1 Cacat Ganda
- .2 Cacat Fisik
- .3 Cacat Mental
- .4 Cacat Mata
- .5 Bisu/Tuli

462 Rehabilitasi Sosial
- .1 Gelandangan/Orang Terlantar, anak jalanan
- .2 Pengemis

.3 Tuna Susila

.4 Anak Nakal

.5 Tuna Wisma

463 Kesejahteraan anak dan keluarga

.1 Kesejahteraan anak

.1 Pengarusutamaan Hak - hak Anak (PUHA)

.2 Perlindungan Anak

.3 Anak Asuh

.2 Kualitas Hidup Perempuan

.1 Perlindungan Perempuan

.2 Ibu Teladan

.3 Pengarusutamaan Gender (PUG)

.3 Anak Putus Sekolah

464 Keperintisan dan Kepahlawanan

.1 Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya

.2 Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan

.3 Cacat Veteran

465 Kesejahteraan Sosial

.1 Lanjut Usia

.2 Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi

.3 Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll

466 Sumbangan Sosial

.1 Korban Bencana

.1 Jaminan Sosial

.2 Pencarian dana untuk sumbangan : penyelanggaraan undian, ketangkasan, bazar dll

.3 Panti Asuhan

.4 Panti Jompo

467 Bimbingan Sosial

.1 Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat terpencil (PKAT) dan sebagainya

468 PMI

469 Makam

.1 Umum

.2 Pahlawan

.3 Khusus, Keluarga, Raja

.4 Krematorium

470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan

471 Pendaftaran Penduduk

.1 Identitas Penduduk

.1 Biodata

.2 Nomor Induk Kependudukan

.3 Kartu Tanda Penduduk

.4 Kartu Keluarga

.5 Advokasi Identitas Penduduk

.2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia

.1 Perpindahan Warga Negara Indonesia (WNI)

.2 Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia

.3 Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara

.4 Daerah terbelakang

.5 Bedol Desa

.3 Perpindahan Penduduk Antar Negara

.1 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri

.2 Orang Asing Tinggal Sementara

.3 Orang Asing Tinggal Tetap

.4 Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)

.4 Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan

.1 Akibat bencana alam

.2 Akibat kerusuhan sosial

.3 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang

.4 Pendaftaran penduduk rentan

472 Pencatatan Sipil

.1 Kelahiran kematian dan advokasi

.1 Kelahiran

.2 Kematian

.3 Advokasi

.2 Perkawinan, perceraian dan advokasi

.1 Perkawinan agama islam

.2 Perkawinan agama non islam

.3 Perceraian agama islam

.4 Perceraian agama non islam

.5 Advokasi

.3 Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi

.1 Pengangkatan anak

.2 Pengakuan anak

.3 Pengesahan anak

.4 Perubahan Akta

.5 Pembatalan akta

.6 Advokasi

.4 Pencatatan Kewarganegaraan

.1 Akibat perkawinan

.2 Akibat kelahiran

.3 Non perkawinan/non kelahiran

.4 Naturalisasi (Pewarganegaraan)

.5 Perubahan WNI ke WNA

473 Informasi Kependudukan

.1 Teknologi Informasi

.1 Perangkat keras

.2 Perangkat lunak

.3 Jaringan Komunikasi Data

.2 Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi

.1 Daerah Maju

.2 Daerah Berkembang

.3 Daerah Terbelakang

.3 Pengolahan Data Kependudukan

.1 Pendaftaran penduduk

.2 Kejadian vital penduduk

.3 Penduduk non registrasi

.4 Pelayanan informasi kependudukan

.1 Media Elektronik

.2 Media Cetak

.3 Outlet

474 Perkembangan Penduduk

.1 Pengarahan Kuantitas Penduduk

.1 Struktur jumlah

.2 Komposisi

.3 Fertilitas

.4 Kesehatan Reproduksi

.5 Morbiditas Penduduk

.6 Mortalitas Penduduk

.2 Pengembangan Kuantitas Penduduk

.1 Anak dan Remaja

.2 Penduduk Usia Produktif

.3 Penduduk Lanjut Usia

.4 Gender

.3 Penataan Persebaran Penduduk

.1 Migrasi antar wilayah

.2 Urbanisasi

.3 Migrasi Internasional

.4 Sementara

.5 Migrasi Non Permanen

.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk

.1 Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk

.2 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi

.3 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya

.4 Partisipasi Masyarakat

.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan

.1 Pendidikan Jalur Sekolah

.2 Pendidikan Jalur Luar Sekolah

.3 Pendidikan Jalur Masyarakat

.4 Pembangunan Berwawasan Kependudukan

475 Transmigrasi

.1 Penyiapan Informasi daerah transmigrasi

.1 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha didaerah transmigrasi

.2 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi

.3 Pemasyarakatan/sosialisasi transmigrasi

.4 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi

.5 Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian

.6 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi

.7 Kerjasama di bidang transmigrasi

.8 Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik

.2 Pemukiman transmigrasi

.1 Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi

.2 Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi

.3 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi

.4 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman

.5 Standarisasi dan spesifikasi rumah transmigran, fasilitas umum/sosial dan jaringan transportasi

.6 Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah

.7 Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman Transmigrasi

.8 Tata ruang pemukiman transmigrasi

.1 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah

.2 Rancangan kapling TSM

.3 Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum

.4 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah

.5 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah

.6 Pengukuran batas unit pemukiman

.7 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah

.9 Sarana pemukiman transmigrasi

.1 Pembinaan dan pengadilan, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum

.2 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih

.3 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi

.4 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana

.5 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan

.3 Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan

.1 Pengkajian dan pengembangan metode pengarahan dan penempatan

.2 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengarahan dan penempatan

.3 Pengerahan

.1 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran

.2 Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran

.3 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan

.4 Pemberangkatan Transmigran

.1 Pengangkutan transmigran melalui laut, udara dan darat

.2 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan

.3 Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan

.4 Pengawalan perjalanan transmigran

.5 Pengaturan rute pemberangkatan

.6 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan

.5 Penempatan Transmigran

.1 Kesiapan lokasi dan daya tampung

.2 Pendapatan transmigran di lokasi yang masih dibina

.3 Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT

.4 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti

.4 Penampungan Transmigrasi (Transito), dan pelatihan transmigran

.1 Pelatihan transmigran

.1 Program pengajaran dan metode pelatihan

.2 Penyusunan silabus dan modul pelatihan

.3 Penyusunan calon peserta/pelatih

.2 Penampungan transmigran di transito

.1 Pelayanan kesehatan bagi transmigran

.2 Pelayanan makanan bagi transmigran

.3 Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran

.5 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

.1 Identifikasi dan penjajagan pembinaan

.1 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian

.2 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan

.3 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan

.2 Pembinaan pendidikan

.1 Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan

.2 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status

.3 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat

.4 Pembinaan Kesehatan

.1 Penyediaan sarana kesehatan dan KB

.2 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa

.3 Pendistribusian bantuan pangan

.5 Pembinaan Rohani

.1 Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama

.2 Bimbingan adaptasi masyarakat

.3 Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial

.6 Pelayanan pos di daerah transmigrasi

.7 Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan

.8 Penilaian transmigran teladan

.9 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha

476 Keluarga Berencana

.1 Alat Kontrasepsi

.2 Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB mandiri

.3 Penyuluh Lapangan KB (PLKB)

.4 Pos KB Desa

.5 Akseptor KB

477 Proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan

.1 Indikator Kependudukan

.1 Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan

.2 Pemanfaatan indikator kependudukan

.3 Sosialisasi indikator kependudukan

.2 Proyeksi penduduk

.1 Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan

.2 Pemanfaatan proyeksi kependudukan

.3 Analisis dampak kependudukan

.1 Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan

.2 Pemanfaatan analisis dampak kependudukan

.4 Penyerasian kebijakan lembaga non pemerintah

.1 Lembaga Internasional

.2 Lembaga Masyarakat dan Nirlaba

.3 Lembaga Usaha Swasta

.5 Penyerasian kebijakan lembaga pemerintah

.1 Lembaga pemerintah

.2 Pemerintah provinsi dan kota

.3 Pemerintah Kabupaten

478 Monitoring dan evaluasi

479 Dokumentasi

480 MEDIA MASSA

.1 Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang media massa

481 Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran

.1 Surat kabar
.2 Majalah/Buletin
.3 Buku
.4 Jurnal/penterjemah
.5 Press Release, klarifikasi berita, press statistik
  .1 Perindustrian perdagangan termasuk 9 harga pokok
  .2 Perekonomian dan perbankan
  .3 Bidang lainnya
.6 Layanan informasi/leaflet

482 Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran

.1 Radio
.2 Televisi
.3 Film Dokumenter
.4 Pengawasan Lembaga Penyiaran
.5 Kelompok pemantau Isi Siaran
.6 Pengkajian Isi Siaran
.7 SDM Penyiaran

483 Periklanan

.1 Ketentuan Pemasangan Reklame
.2 Pameran

484 Kewartawanan/Jurnalistik

.1 Pembentukan Organisasi Profesi
.2 Kasus-kasus Kewartawanan
.3 Penyalahgunaan Profesi
.4 Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan
.5 Musyawarah Wartawan Indonesia
.6 Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
.7 Temu Pers/Konferensi Pers
.8 Pers Tour
.9 Kunjungan Wartawan Asing

485 Penyuluhan Masyarakat

.1 Publikasi
.2 Pendirian Information Center

486 Pembinaan Bidang Infokom

.1 Training Photografi

.2 Training Berita Jurnalistik

.3 Bintek Infokom

.4 Rakorda Infokom

.5 Rakor Pengendalian Kegiatan

.6 Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

487 Hubungan Antar Lembaga

.1 Non Pemerintah

.1 Wahana komunikasi masyarakat

.2 Lembaga komunikasi masyarakat

.2 Lembaga Pemerintah

.1 Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan

.2 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)

.3 Luar Negeri

.1 Promosi Luar Negeri

.2 Kunjungan Wartawan Asing

488 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi

489 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Bupati

.1 Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan, Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif

.2 Dialog Interaktif

.3 Rubrik

.4 Materi/pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif

.5 Pembuatan Kolom Khusus Hasil-hasil Pembangunan

490 Grafika

491 Penerangan

.1 Pameran Non Komersil

492 Operation Room

493 Hubungan Masyarakat

500 PEREKONOMIAN

.1 Dewan Stabilisasi

501 Pengadaan Pangan

502 Pengadaan Sandang

503 Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya

510 PERDAGANGAN/TATA NIAGA

.1 Promosi perdagangan

.1 Pekan Raya

.2 Iklan

.3 Pameran, Pameran Non Komersial

.4 Event - event

.2 Pelelangan

.3 Bina usaha dan sarana perdagangan

.4 Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)

.5 Tera

.6 Bantuan peralatan

511 Pemasaran

.1 Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll

.2 P a s a r

.3 Pertokoan, kaki lima, kios

.4 Pusat perbelanjaan

512 Ekspor

513 Impor

514 Perdagangan antar Pulau

515 Perdagangan Luar Negeri

516 Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng

517 Aneka Usaha Perdagangan

518 Koperasi (Untuk BUUD, KUD)

.1 Bina Usaha Koperasi

.2 Bina Lembaga Koperasi

.3 Usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM)

520 PERTANIAN

521 Tanaman pangan

.1 Rencana dan Program

.1 Bimas/Inmas Termasuk Kredit

.2 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian

.3 Penyuluhan

.2 Produksi

.1 Padi

.2 Palawija (Jagung, Ketela Pohon/Ubi-ubian)

.3 Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)

.4 Panen Gagal (Puso)

.5 Pembudidayaan Rumput Laut

.3 Sarana Usaha Pertanian
- .1 Peralatan
- .2 Meliputi Traktor dan sebagainya
- .3 Pembenihan dan pembibitan
- .4 Pupuk
- .5 Irigasi Pertanian
- .6 Rehabilitasi Lahan Pertanian

.4 Perlindungan Tanaman
- .1 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
- .2 Pemberantasan (meliputi : penyemprotan, penyiangan, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara)
- .3 Pestisida

.5 Tanah Pertanian Pangan
- .1 Persawahan
- .2 Perladangan
- .3 Kebun
- .4 Rumpon Ikan Laut
- .5 KTA/Lahan kritis

.6 Pengusaha Petani

.7 Bina Usaha
- .1 Pasca panen
- .2 Pemasaran hasil
- .3 Kelompok Tani dan Rukun Tani

522 Kehutanan

.1 Program
- .1 Hak Pengusahaan Hutan
- .2 Tata Guna Hutan
- .3 Perpetaan Hutan
- .4 Tumpangsari

.2 Produksi
- .1 Kayu
- .2 Non Kayu

.3 Sarana Usaha Kehutanan

.4 Penghijauan, Reboisasi

.5 Kelestarian
- .1 Cagar alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa
- .2 Berburu, meliputi larangan dan izin berburu
- .3 Kebun Binatang
- .4 Konservasi Lahan

.6 Penyakit/Hama

.7 Jenis - jenis hutan

.1 Hutan hidup

.2 Hutan wisata

.3 Hutan produksi

.4 Hutan lindung

523 Perikanan dan kelautan

.1 Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang perikanan dan Kelautan

.1 Penyuluhan

.2 Teknologi

.2 Produksi Perikanan

.1 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan

.2 Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC

.3 Sertifikasi Kesehatan Ikan

.3 Usaha Perikanan

.1 Pelatihan Nelayan

.2 Pembinaan wanita nelayan

.3 Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP

.4 Perbenihan

.4 Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan

.1 Ekspor Hasil Perikanan

.2 Impor Hasil Perikanan

.3 Pemasaran Dalam Negeri

.4 Pengusaha perikanan

.5 Sarana Perikanan

.1 Pelabuhan Perikanan Pantai

.2 TPI/PPI

.3 Kesyahbadaran

.4 Peralatan penangkapan : Kapal, perahu, jaring, pump dsb

.6 Pengendalian hama dan penyakit

.1 Penyakit Ikan

.2 Hama Ikan

.3 Obat-obatan termasuk sertifikasinya

.7 Konservasi dan Suaka Laut

.1 Transplatasi bibit Karang

.2 Terumbu Karang

.3 Mangrove

.4 Garam

.5 Harta Karun di dalam laut

.6 Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir

524 Peternakan dan Kesehatan Hewan

.1 Produksi

.1 Perbibitan

.2 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

.3 Budidaya

.4 Susu ternak rakyat

.5 Telur

.6 Daging

.7 Kulit

.2 Usaha Peternakan

.1 Pelayanan Usaha

.2 Pengolahan Hasil dan Pemasaran

.3 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan

.3 Laboratorium Kesehatan Hewan

.1 Pengujian Mutu Asal Hewan

.2 Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan

.4 Pembibitan dan Budi Daya Ternak

.1 Inseminasi buatan

.2 Pembibitan/bibit unggul

.3 Penyebaran ternak

.5 Sarana Usaha Ternak

.1 Pembibitan

.2 Kandang Ternak

.6 Kesehatan Hewan

.1 Penyakit Hewan

.2 Pos Kesehatan Hewan

.3 Test Pullorum

.4 Karantina

.5 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Upaya pencegahannya

.7 Makanan Ternak

.8 Tempat Pemotongan Hewan

.9 Data Peternakan

525 Perkebunan

.1 Program dan Pelaporan

.2 Produksi

.1 Karet

.2 T e h

.3 Tembakau

.4 Tebu

.5 Cengkeh
.6 Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit
.7 Kopi
.8 Kakao
.9 Jenis Tanaman yang lain

526 Ketahanan Pangan
.1 Perencanaan dan Program
.2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
.3 Agribisnis
.4 Distribusi Pangan
.5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan

527 Penyuluhan
.1 Sumber Daya Manusia
.2 Kelembagaan
.3 Penyelenggaraan Penyuluhan

530 PERINDUSTRIAN

.1 Undang - Undang Gangguan

531 Industri Logam
532 Industri Mesin/Elektronik
533 Industri Kimia/Farmasi
534 Industri Tekstil
535 Industri makanan/Minuman
536 Aneka Industri/Perusahaan
537 Aneka Kerajinan
538 Usaha Negara
.1 Perjan
.2 Perum
.3 Persero
539 Perusahaan Daerah

540 PERTAMBANGAN DAN KESAMUDERAAN

541 Minyak bumi/Gas Bumi
.1 Pengusahaan
.2 Penyaluran
.3 Pengolahan, Tangki, Pompa, Tanker
542 Logam
.1 Emas, Perak, Timah, Alumunium, Besi, Tembaga dll
543 Aneka Tambang
.1 Batu mulia dan galian C

544 Geologi
- .1 Vulkanologi
- .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah

545 Hidrologi

546 Kesamuderaan

547 Pesisir pantai

550 PERHUBUNGAN

551 Perhubungan Darat
- .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
- .2 Keamanan lalu lintas, rambu - rambu
- .3 Angkutan jalan raya
- .4 Perizinan
- .5 Alat angkutan
- .6 Terminal
- .7 Perkeretaapian

552 Perhubungan Laut
- .1 Lalu Lintas Angkutan Laut
- .2 Perkapalan - Alat Angkutan
- .3 Pelabuhan
- .4 Pengerukan/Perawatan
- .5 Penjagaan Pantai
- .6 Angkutan Barang
- .7 Keselamatan
- .8 Kecelakaan, Gangguan
- .9 Perijinan

553 Perhubungan Udara
- .1 Lalu Lintas Angkatan Udara
- .2 Pelabuhan Udara
- .3 Alat Angkutan
- .4 Angkutan Barang
- .5 Sertifikasi Kelaikan
- .6 Keamanan dan Keselamatan
- .7 Kecelakaan/Gangguan
- .8 Umum
- .9 Perizinan

554 Pos

555 Telekomunikasi
- .1 Kebijakan
- .2 Telepon
- .3 Telegram

.4 Satelit/Internet

.5 Stasiun Bumi

.6 Telex/SSB, Faximile

556 Pariwisata dan Rekreasi

.1 Objek Kepariwisataan

.2 Perhotelan

.3 Travel Service

.4 Tempat Rekreasi

557 Meteorologi

.1 Curah Hujan

.2 Hujan Buatan

.3 Peneropongan Bintang

.4 Ramalan Cuaca

.5 Kemarau Panjang

560 TENAGA KERJA

.1 Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri

.2 Job Order TKI Ke Luar Negeri Oleh PJTKI

.3 Rekruitmen Calon TKI/TKW

.4 Seleksi Naker Ke Luar Negeri

.5 Persyaratan Naker TKI/TKW

.6 Pemberangkatan Naker

.7 Pemulangan Naker

.8 Pengangguran

561 Upah

.1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional

.2 Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah

.3 Kebutuhan Fisik Minuman

.4 Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)

.5 Laporan Data Remintance

.6 Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW

562 Penempatan

.1 Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)

.2 Kesepakatan Kerja Bersama (KLB)

.3 Lembaga Penyalur Naker

563 Latihan Kerja

.1 Pendidikan Kerja

.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja

.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja

564 Tenaga Sukarela
- .1 Butsi
- .2 Padat Karya

565 Perselisihan Kerja
- .1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
- .2 Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja

566 Keselamatan Kerja
- .1 Instalasi Proteksi Kebakaran
- .2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
- .3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Bekerja
- .4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan
- .5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- .6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
- .7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
- .8 Perlengkapan Sarana Kerja
- .9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (Shift Malam)

567 Pemutusan Hubungan Kerja
- .1 Pengaduan PHK Sepihak
- .2 PHK Massal
- .3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
- .4 Ijin Melakukan PHK
- .5 Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
- .6 Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang Di PHK
- .7 Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK

568 Kesejahteraan Pekerja
- .1 Bantuan Kredit/bantuan Modal Kerja bagi Naker
- .2 Perumahan Pekerja
- .3 Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
- .4 Koperasi Pekerja
- .5 Sarana Transportasi Pekerja
- .6 Perpustakaan Pekerja
- .7 Tempat Ibadah Pekerja
- .8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
- .9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan

569 Tenaga Kerja Orang Asing
- .1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- .2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- .3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing

.4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
.5 Data Tenaga Kerja Asing
.6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
.8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
.9 Tenaga Kerja Asing Ilegal

570 PENANAMAN MODAL

571 Modal Domestik
572 Modal Asing
573 Modal Patungan (Joint venture)
574 Pasar Uang dan Modal
575 Saham

580 PERBANKAN MONETER

581 Kredit
582 Inventasi
583 Tabungan
.1 Deposito
.2 Tabanas
.3 Taska
.4 Tapelpram
584 Bank Pembangunan Daerah
585 Asuransi
586 Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer
587 Fiscal
588 Hutang Negara Obligasi
589 Moneter

590 AGRARIA

591 Tata Guna Tanah
.1 Pemetaan dan Pengukuran
.2 Perpetaan
.3 Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
.4 Fatwa Tata Guna Tanah
.5 Tanah Kritis
592 Landreform
.1 Retribusi
.2 Ganti Rugi
.3 Bagi Hasil
.4 Gadai Tanah

.5 Bimbingan dan Penyuluhan

.6 Pengembangan

.7 Yayasan Dana Landreform (YDL)

593 Pengurusan Hak-hak Tanah

.1 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis

.1 Sewa Tanah

.2 Sewa Tanah untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau rosela, Corchorus

.2 Hak Milik

.1 Perorangan

.2 Badan Hukum

.3 Hak Pakai

.1 Perorangan

.1 Warga Negara Indonesia

.2 Warga Negara Asing

.2 Badan Hukum

.1 Badan Hukum Indonesia

.2 Badan Hukum Asing, Kedutaan Konsulat, Kantor Dagang Asing

.3 Tanah Gedung - Gedung Negeri

.4 Guna Usaha

.1 Perkebunan Besar

.2 Perkebunan Rakyat

.3 Peternakan

.4 Perikanan

.5 Kehutanan

.5 Hak Guna Bangunan

.1 Perorangan

.2 Badan Hukum

.3 P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)

.4 Badan Hukum Asing Belanda - PBK No. 5/56

.5 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)

.6 Hak Pengelolaan

.1 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate

.2 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan

.7 Sengketa tanah

.1 Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)

.8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah

.1 Pencabutan Hak

.2 Pembebasan Tanah

.3 Ganti Rugi Tanah

594 Pendaftaran Tanah

.1 Pengukuran/Pemetaan

.1 Fotogrametri

.2 Terristris

.3 Triangulasi

.4 Peralatan

.2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965)

.3 Sertifikat

.4 Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)

595 Lahan Transmigrasi

.1 Tata Guna Tanah

.2 Landreform

.3 Pengurusan Hak-hak Tanah

.4 Pendaftaran Tanah

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

601 Tata Bangunan Konstruksi dan Industri Konstruksi

602 Kontraktor Pemborong

.1 Tender

.2 Penunjukan

.3 Prakualifikasi

.1 Daftar Rekanan Mampu (DRM)

.2 Tanda Daftar Rekanan (TDR)

603 Arsitektur

604 Bahan Bangunan

.1 Tanah dan Batu

.2 Aspal

.3 Besi dan logam lainnya

.1 Besi beton

.2 Besi Profil (konstruksi)

.3 Paku

.4 Alumunium profil

.4 Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, Pengawet kayu)

.5 S e m e n

.6 K a y u

.7 Bahan penutup Atap

.8 Alat-alat penggantung dan pengunci

.9 Bahan -bahan bangunan lainnya

605 I n s t a l a n s i

.1 Instalansi bangunan

.2 Instalansi listrik

.3 Instalansi air/sanitasi

.4 Instalansi pengatur udara

.5 Instalansi akustik

.6 Instalansi cahaya/penerangan

606 Konstruksi pencegahan

.1 Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran

.2 Terhadap gempa

.3 Terhadap angin/udara/panas

.4 Terhadap Kegaduhan

.5 Terhadap gas/explosive

.6 Terhadap serangga

.7 Terhadap radiasi atom

610 P E N G A I R A N

611 Irigasi

.1 Bangunan Waduk

.1 Bendungan

.2 Tanggul

.3 Pelimpahan Banjir

.4 Menara Pengambilan

.2 Bangunan Pengambilan

.1 Bendungan

.2 Bendungan dengan pintu bilas

.3 Bendungan dengan pompa

.4 Pengambilan bebas

.5 Pengambilan bebas dengan pompa

.6 Sumur dengan pompa

.7 Kantung Lumpur

.8 Silt Ekstractor

.9 Escape Channel

.3 Bangunan pembawa

.1 Saluran

.2 Bangunan/Gedung

.3 Box tersier

.4 Got miring

.5 Talang

.6 Syphon
.7 Gorong - gorong
.8 Pelimpahan samping

.4 Bangunan Pembangunan
.1 Saluran
.2 Bangunan
.3 Gorong - gorong pembuangan
.4 Talang pembuangan
.5 Syphon pembuangan

.5 Bangunan lainnya
.1 Jalan
.2 Jembatan
.3 Tangga Cuci
.4 Kubangan kerbau
.5 Waduk lapangan
.6 Bangunan penunjang
.7 Jaringan telepon
.8 Stasiun argo

612 Folder

.1 Tanggul Keliling
.1 Tanggul
.2 Bangunan Penutup Sungai
.3 Jembatan

.2 Bangunan Pembawa
.1 Saluran
.2 stasiun pompa pemasukan
.3 Bangunan bagi :
.4 Gorong - gorong
.5 Syphon

.3 Bangunan Pembuangan
.1 Stasiun pompa pembuangan
.2 Saluran
.3 Pintu air pembuangan
.4 Gotong - gorong pembuangan
.5 Syphon pembuangan

.4 Bangunan lainnya
.1 Bangunan
.2 Rumah petugas eksploitasi

613 Pasang surut
- .1 Bangunan pembawa
  - .1 Saluran
  - .2 Bangunan pintu pemasukan
- .2 Bangunan Pembuangan
  - .1 Saluran
  - .2 Bangunan pintu pembuang
- .3 Bangunan lainnya
  - .1 Kolom pasang
  - .2 Saluran
  - .3 Bangunan
  - .4 Jalan
  - .5 Jembatan

614 Pengendalian sungai
- .1 Bangunan pengaman
  - .1 Tanggul banjir
  - .2 Pintu pengatur banjir
  - .3 Klep pengatur banjir
  - .4 Tembok pengaman talut
  - .5 Krib
  - .6 Kantung Lumpur
  - .7 Check Dam
  - .8 Syphon
- .2 Saluran pengaman
  - .1 Saluran banjir
  - .2 Saluran Drainase
  - .3 Corepure
- .3 Bangunan lainnya
  - .1 Warning system
  - .2 Stasiun

615 Pengaman Pantai
- .1 Tanggul
- .2 K r i b
- .3 Bangunan lainnya

616 Air tanah
- .1 Stasiun Pompa
- .2 Bangunan Pembawa
- .3 Bangunan Pembuangan
- .4 Bangunan lainnya

620 J A L A N

621 Jalan Kota/Kabupaten

.1 Daerah Penguasaan

.1 Tanah

.2 Tanaman

.3 Bangunan

.2 Bangunan Sementara

.1 Jalan Sementara

.2 Jembatan Sementara

.3 Kantor Proyek

.4 Gedung Proyek

.5 Barak Kerja

.6 Laboratorium Lapangan

.7 Rumah

.3 Badan jalan

.1 Pekerjaan tanah (earth work)

.2 Stabilisasi

.4 Perkerasan

.1 Lapisan pondasi bawah

.2 Lapisan pondasi

.3 Lapisan permukaan

.5 Drainase

.1 Parit tanah

.2 Gorong - gorong (culvert)

.6 Buku Trotoir

.1 Tanah

.2 Perkerasan

.3 Pasangan

.7 Median

.1 Tanah

.2 Tanaman

.3 Perkerasan

.4 Pasangan

.8 Daerah Sampingan

.1 Tanaman

.2 Pagar

.9 Bangunan pelengkap dan pengaman

.1 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas

.2 Lampu penerangan

.3 Lampu pengaturan lalu lintas

.4 Patok - patok KM
.5 Patok - patok R.O.W (sempadan)
.6 Rel pengamanan
.7 Pagar
.8 Turap penahan
.9 Bronjong

622 Jalan Provinsi

.1 Daerah Penguasaan
.1 Tanah
.2 Tanaman
.3 Bangunan

.2 Bangunan sementara
.1 Jalan Sementara
.2 Jembatan Sementara
.3 Kantor/gedung proyek
.4 Barak Kerja
.5 Laboratorium Lapangan
.6 Rumah

.3 Badan jalan
.1 Pekerjaan tanah (earth work)
.2 Stabilisasi

.4 Perkerasan
.1 Lapis pondasi
.2 Lapis Pondasi bawah
.3 Lapis permukaan

.5 Drainase
.1 Parit
.2 Gorong - gorong (culvert)
.3 Sub drainase

.6 Trotoir
.1 Tanah
.2 Perkerasan

.7 Median
.1 Tanah
.2 Tanaman
.3 Perkerasan
.4 Pasangan

.8 Daerah Sampingan
.1 Tanaman
.2 Pagar

.9 Bangunan perlengkapan dan pengamanan

.1 Rambu - rambu

.2 Lampu penerangan

.3 Lampu pengaturan lalu lintas

.4 Patok - patok KM

.5 Patok - patok R.O.W (sempadan)

.6 Rel pengamanan

.7 Pagar

.8 Turap penahan

.9 Bronjong

623 Jalan Layang

630 JEMBATAN

631 Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten

.1 Daerah Penguasaan

.1 Tanah

.2 Tanaman

.3 Bangunan

.2 Bangunan Sementara

.1 Jalan Sementara

.2 Jembatan Sementara

.3 Kantor Proyek

.4 Gudang proyek

.5 Barak Kerja

.6 Laboratorium Lapangan

.7 Rumah

.3 Pekerjaan tanah (earth work)

.1 Galian tanah

.2 Timbunan tanah

.4 Pondasi

.1 Pondasi kepala jembatan

.2 Pondasi pilar

.3 Pondasi angker

.5 Bangunan bawah

.1 Kepala Jembatan

.2 Pilar

.3 Piloon

.4 Landasan

.6 Bangunan
- .1 Gelagar
- .2 Lantai
- .3 Perkerasan
- .4 Jalan orang/trotoir
- .5 Sandaran
- .6 Talang air

.7 Bangunan pengaman
- .1 Turap penahan
- .2 Bronjong
- .3 Strek Dam
- .4 Kist Dam
- .5 Coupute
- .6 Krib

.8 Bangunan Pelengkap
- .1 Rambu - rambu/tanda - tanda lalu lintas
- .2 Lampu penerangan
- .3 Lampu lalu lintas
- .4 Patok - patok KM
- .5 Patok - patok ROW
- .6 Rel pengaman
- .7 Pagar

.9 Oprit
- .1 Badan
- .2 Perkerasan
- .3 Drainase
- .4 Baku
- .5 Median

632 Jembatan pada Jalan Provinsi

.1 Daerah Penguasaan
- .1 Tanah
- .2 Tanaman
- .3 Bangunan

.2 Bangunan Sementara
- .1 Jalan Sementara
- .2 Jembatan Sementara
- .3 Kantor Proyek
- .4 Gedung Proyek

.5 Barak Kerja
.6 Laboratorium Lapangan
.7 Rumah

.3 Pekerjaan tanah (earth work)
.1 Galian tanah
.2 Timbunan tanah

.4 Pondasi
.1 Pondasi kepala jembatan
.2 Pondasi pilar
.3 Pondasi angker

.5 Bangunan bawah
.1 Kepala Jembatan
.2 Pilar
.3 Piloon
.4 Landasan

.6 Bangunan atas
.1 Gelagar
.2 Lantai
.3 Perkerasan
.4 Jalan orang/trotoir
.5 Sandaran
.6 Talang air

.7 Bangunan Pengaman
.1 Turap/penahan
.2 Bronjong
.3 Strek Dam
.4 Kist Dam
.5 Corepure
.6 Krib

.8 Bangunan pelengkap
.1 Rambu - rambu/tanda - tanda lalu lintas
.2 Lampu penerangan
.3 Lampu Lalu - lintas
.4 Patok - patok KM
.5 Patok - patok ROW
.6 Rel - rel pengaman
.7 Pagar

.9 Oprit

.1 Badan

.2 Perkerasan

.3 Drainase

.4 Baku

.5 Median

633 Jembatan gantung

640 BANGUNAN

641 Bangunan Pemerintah

.1 Gedung Pengadilan

.2 Rumah Pejabat Negara

.3 Gedung DPR

.4 Gedung Balai Kota

.5 Penjara

.6 Perkantoran

.7 Rumah Dinas

642 Bangunan Pendidikan

.1 Taman Kanak-kanak

.2 SD & Sekolah Menengah

.3 Perguruan Tinggi

643 Bangunan Rekreasi

.1 Bangunan Olah Raga

.2 Gedung Kesenian

.3 Gedung Pemancar

644 Bangunan Perdagangan

.1 Pusat Perbelanjaan (Pasar, Mall, Supermarket, dept store)

.2 Gedung Perdagangan

.3 B a n k

.4 Perkantoran

645 Bangunan Pelayanan Umum

.1 Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum

.2 Gedung Parkir

.3 Rumah Sakit

.4 Gedung Telkom

.5 Terminal Angkutan Umum

.6 Terminal Angkutan Air

.7 Terminal Angkutan Darat/Halte

.8 Bangunan Keagamaan

646 Bangunan Peninggalan Sejarah
- .1 Monumen
- .2 Candi
- .3 Kraton
- .4 Rumah Tradisional

647 Bangunan Industri

648 Bangunan Tempat Tinggal
- .1 Rumah Perkotaan
  - .1 Inti /sederhana
  - .2 Sedang/Mewah
- .2 Rumah Pedesaan
  - .1 Rumah Contoh
- .3 Real Estate

649 Elemen Bangunan
- .1 Pondasi
  - .1 Diatas Tiang
- .2 Dinding
  - .1 Penahan beban
  - .2 Tidak menahan beban
- .3 A t a p
- .4 Lantai/langit-langit
  - .1 Suspended
  - .2 Solit
- .5 Pintu/Jendela
  - .1 Pintu Harmonik
  - .2 Pintu biasa
  - .3 Pintu sorong
  - .4 Jendela biasa
  - .5 Jendela sorong
  - .6 Jendela vertikal

650 TATA RUANG KOTA

651 Daerah Perdagangan/pelabuhan
- .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
- .2 Daerah Perkotaan

652 Daerah Pemerintah

653 Daerah Perumahan (site & service)
- .1 Kepadatan Rendah (low density)
- .2 Kepadatan Tinggi (high density)

654 Daerah Industri
- .1 Industri Berat
- .2 Industri Ringan
- .3 Industri Rumah (home industri)

655 Daerah Rekreasi (open space)
- .1 Taman Kota
- .2 Tempat Olahraga dan bermain
- .3 Ruang terbuka

656 Transportasi
- .1 Jaringan jalan
  - .1 Penerangan Jalan
- .2 Jaringan Kereta Api
- .3 Jaringan Sungai

657 Assainering
- .1 Saluran Pengumpulan
- .2 Instalasi Pengolahan
  - .1 Bangunan
  - .6 Unit Disinfektan
- .3 Unit Perpompaan

658 Kesehatan Lingkungan
- .1 Persampahan
  - .1 Bangunan Pengumpulan
  - .2 Bangunan Pemusnahan
- .2 Pengotoran Udara
- .3 Pengotoran Air
  - .1 Air Buangan Industri
- .4 Kegaduhan/polusi udara
- .5 Kebersihan kota

660 TATA LINGKUNGAN
- .1 Lingkungan Hidup
- .2 Kebersihan Lingkungan
- .3 Pencemaran

661 Daerah Hutan

662 Daerah Pertanian

663 Daerah Pemukiman

664 Pusat Pertumbuhan

665 Transportasi
- .1 Jaringan jalan
- .2 Jaringan kereta api
- .3 Jaringan Sungai

670 KETENAGAAN

.1 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

671 Listrik

.1 Kelistrikan

.1 Kelistrikan PLN

.2 Kelistrikan non PLN

.2 Pembangkit Tenaga Listrik

.1 PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air

.2 PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

.3 PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas

.4 PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari

.5 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

.6 PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

.7 PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap

.3 Transmisi Tenaga Listrik

.1 Gardu Induk/gardu penghubung/gardu trafo

.2 Saluran Udara tegangan tinggi

.3 Kabel Bawah Tanah

.4 Distribusi Tenaga Listrik

.1 Gardu Distribusi

.2 Tegangan Rendah

.3 Tegangan Menengah

.4 Jaringan Bawah Tanah

.5 Pengusahaan Listrik

.1 Sambungan Listrik

.2 Penjualan Tenaga Listrik

.3 Tarif Listrik

672 Tenaga Air

673 Tenaga Minyak

674 Tenaga Gas

675 Tenaga Matahari

676 Tenaga Nuklir

677 Tenaga Panas Bumi

678 Tenaga Uap

679 Tenaga Lainnya

680 PERALATAN

690 AIR MINUM

691 Intake

.1 Broncaptering

.2 Sumur

.3 Bendungan
.4 Saringan (screen)
.5 Pintu air
.6 Saluran Pembawa
.7 Alat ukur
.8 Perpompaan

692 Transmisi Air Baku
.1 Perpipaan
.2 Katup Udara (Air Rolief)
.3 Tutup penguras (Blow oof)
.4 Bak Pelepas tekanan
.5 Jembatan pipa
.6 Syphon

693 Instalasi Pengelolaan
.1 Bangunan ukur
.2 Bangunan Aerasi
.3 Bangunan Pengendapan
.4 Bangunan Pembubuh bahan kimia
.5 Bangunan Pengaduk
.6 Bangunan Saringan
.7 Perpompaan
.8 Clear Hell

694 Distribusi
.1 Reservoir menara bawah tanah
.1 Menara
.2 Reservoir di bawah tanah
.2 Perpipaan
.3 Perpompaan
.4 Jembatan pipa
.5 syphon
.6 Hydran
.1 Hydran Umum
.2 Hydran Kebakaran
.7 Katup
.1 Katup Udara (air relief)
.2 Katup pelepas (blow off)
.8 Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)

700 PENGAWASAN

.1 Kebijakan dan program pengawasan

.2 Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek

701 Bidang urusan dalam

702 Bidang Peralatan

703 Bidang Kekayaan Daerah

704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi

705 Bidang perencanaan

706 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan

707 Bidang Penelitian

708 Bidang Konferensi

709 Bidang Perjalanan Dinas

710 BIDANG PEMERINTAHAN

711 Bidang Pemerintahan Pusat

712 Pengawasan Pemerintahan Provinsi

713 Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

714 Pengawasan Pemerintahan Desa/Gampong

715 Bidang MPR/DPR

716 Bidang DPRA

717 Bidang DPRK

718 Bidang Hukum

719 Bidang Hubungan Luar Negeri

720 BIDANG POLITIK

721 Bidang Kepartaian

722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan

723 Bidang Organisasi profesi dan fungsional

724 Bidang Organisasi Pemuda

725 Bidang Organisasi Buruh, tani dan nelayan

726 Bidang Organisasi Wanita

727 Bidang Pemilihan Umum

730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN

731 Bidang Pertahanan

732 Bidang Kemiliteran

733 Bidang Perlindungan Masyarakat

734 Bidang Keamanan

735 Bidang Kejahatan

736 Bidang Bencana

737 Bidang Kecelakaan

740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

741 Bidang Pembangunan Desa/Gampong
742 Bidang Pendidikan
743 Bidang Kebudayaan
744 Bidang Kesehatan
745 Bidang Agama
746 Bidang Sosial
747 Bidang Kependudukan
748 Bidang Media Massa

750 BIDANG PEREKONOMIAN

751 Bidang Perdagangan
752 Bidang Pertanian
753 Bidang Perindustrian
754 Bidang Pertambangan/kesamuderaan
755 Bidang Perhubungan
756 Bidang Tenaga Kerja
757 Bidang Permodalan
758 Bidang Perbankan/Moneter
759 Bidang Pertanahan/Agraria

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

761 Bidang Pengairan
762 Bidang Jalan
763 Bidang Jembatan
764 Bidang Bangunan
765 Bidang Tata Kota
766 Bidang Lingkungan
767 Bidang Ketenagaan
768 Bidang Peralatan
769 Bidang Air Minum

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

781 Bidang Pengadaan PNS
782 Bidang Mutasi pegawai
783 Bidang kedudukan pegawai
784 Bidang kesejahteraan pegawai
785 Bidang Cuti
786 Bidang penilaian
787 Bidang tata usaha kepegawaian
788 Bidang pemberhentian pegawai
789 Bidang pendidikan pegawai

790 BIDANG KEUANGAN

791 Bidang Anggaran

792 Bidang otorisasi

793 Bidang Verifikasi

794 Bidang Pembukuan

795 Bidang Perbendaharaan

796 Bidang pembinaan kebendaharaan

797 Bidang Pendapatan

799 Bidang bendaharawan

800 KEPEGAWAIAN

.1 Perencanaan

.2 Penelitian

.1 Pengaduan

.2 Tim

.3 Statistik

.4 Peraturan perundang-undangan

810 PENGADAAN

811 Pendaftaran CPNS

.1 Testing

.2 Screening

.3 Pengumuman tes dan Pemanggilan

812 Pengujian Kesehatan

813 Pengangkatan CPNS

.1 Pengangkatan CPNS Golongan I

.2 Pengangkatan CPNS Golongan II

.3 Pengangkatan CPNS Golongan III

.4 Pengangkatan CPNS Golongan IV

814 Pengangkatan Tenaga Lepas

.1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak

.2 Pengangkatan Tenaga Harian

.3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan

820 MUTASI

821 Pengangkatan

.1 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

.1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I

.2 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II

.3 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III

.4 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

.5 Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Cuti diluar tanggungan negara

.2 Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji

.1 Eselon I

.2 Eselon II

.3 Eselon III

.4 Eselon IV

.3 Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji

822 Kenaikan Gaji Berkala

.1 PNS Golongan I

.2 PNS Golongan II

.3 PNS Golongan III

.4 PNS Golongan IV

823 Kenaikan Pangkat

.1 PNS Golongan I

.2 PNS Golongan II

.3 PNS Golongan III

.4 PNS Golongan IV

824 Pemindahan/Pelimpahan/Pembantuan

.1 PNS Golongan I

.2 PNS Golongan II

.3 PNS Golongan III

.4 PNS Golongan IV

.5 Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)

825 Datasering dan Penempatan Kembali

826 Penunjukan Tugas Belajar

.1 Dalam Negeri

.2 Luar Negeri

.3 Tunjangan Belajar

.4 Penempatan Kembali

827 Wajib Militer

828 Mutasi Pegawai Instansi Lainnya

830 KEDUDUKAN

831 Perhitungan masa kerja

832 Penyesuaian Pangkat/Gaji

.1 PNS Golongan I

.2 PNS Golongan II

.3 PNS Golongan III

.4 PNS Golongan IV

833 Penghargaan Ijasah/Penyesuaian ijazah

834 Penghargaan Lainnya

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

841 Tunjangan

.1 Jabatan

.2 Kehormatan

.3 Dana Kematian (uang duka)

.4 Tunjangan Hari Raya

.5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah

.6 Keluarga

.7 Pangan, Sandang, Papan (Bapetarum)

842 Dana

.1 Taspen

.2 Askes, Bantuan kesehatan

.3 Bantuan pendidikan

843 Perawatan kesehatan

.1 Poliklinik, Klinik Konsultasi

.2 Perawatan Dokter

.3 Obat-obatan

.4 Keluarga Berencana

844 Koperasi

.1 Distribusi Pangan

.2 Distribusi Sandang

.3 Distribusi Lainnya

845 Perumahan PNS

.1 Perumahan pegawai

.2 Tanah Kapling

.3 Losmen/Hotel

846 Bantuan Sosial

.1 Bantuan kebakaran

.2 Bantuan kebanjiran

847 Rekreasi

848 Dispensasi

850 C U T I

851 Cuti Tahunan

852 Cuti Besar

853 Cuti Sakit

854 Cuti Hamil

855 Cuti Naik Haji

856 Cuti Diluar Tanggungan Negara

857 Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting

860 PENILAIAN

861 Penghargaan

.1 Bintang/Satyalencana Karya Satya

.2 Kenaikan Pangkat Anumerta

.3 Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat

.4 Hadiah Berupa Uang

.5 Pegawai Teladan

862 Hukuman

.1 Teguran peringatan

.2 Penundaan Kenaikan Gaji

.3 Penurunan Pangkat

.4 Pemindahan

863 Kondite, DP3, Disiplin Pegawai

864 Ujian Dinas

.1 Tingkat I

.2 Tingkat II

.3 Tingkat III

865 Penilaian Kinerja

.1 Struktural

.2 Fungsional

866 Rehabilitasi

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

871 Formasi

872 Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian

873 Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian

.1 NIP

.2 KARPEG

.3 Legitimasi/Tanda Pengenal

.4 Daftar Keluarga/KP4

.5 KARSU/KARIS

874 Daftar Riwayat Pekerjaan

.1 Tanggal Lahir

.2 Penggantian Nama

.3 Izin Kepartaian/Organisasi

875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
.1 Pelimpahan Wewenang
.2 Spesimen tanda tangan
876 Penggajian
.1 SKPP
877 Sumpah/janji
878 Korps Kepegawaian

880 PEMBERHENTIAN

881 Atas Permintaan Sendiri termasuk pengunduran diri
882 Dengan hak pensiun
.1 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. I
.2 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. II
.3 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. III
.4 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. IV
.5 Pensiun Janda/Duda
.6 Pensiun Yatim Piatu
.7 Uang muka Pensiun
883 Karena meninggal
.1 Karena meninggal dalam tugas
884 Alasan lain, diantaranya Keuzuran Jasmani
885 Uang Pesangon
886 Uang Tunggu
887 Uang sementara waktu
.1 Pembekalan PNS yang akan purna tugas
888 Tidak dengan hormat
.1 Tali asih pensiun

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

891 Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
.1 Program
.2 Kurikulum dan silabus
.3 Proposal atau TOR
892 Pendidikan Reguler/Kader
.1 IPDN/APDN
.2 Kursus - kursus reguler
893 Pendidikan dan pelatihan/Non reguler
.1 LEMHANAS
.2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural
.3 Kursus - kursus/penataran
.4 Diklat Teknis, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan
.5 Diklat Lainnya

894 Pendidikan Luar Negeri
- .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
- .2 Non Gelar/Diploma

895 Metode
- .1 Kuliah
- .2 Ceramah, Symposium
- .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
- .4 Kuliah Lapangan/OL, Widya Wasta, KKN
- .5 Tanya jawab, Silabi, Modul, Kursil
- .6 Penugasan
- .7 Gladi

896 Tenaga Pengajar/widyaiswara/Narasumber
- .1 Moderator

897 Administrasi Pendidikan
- .1 Tahun Pelajaran
- .2 Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing, ujian
- .3 STTP
- .4 Penilaian Angka Kredit
- .5 Laporan Pendidikan dan Pelatihan

898 Fasilitas Belajar
- .1 Tunjangan Belajar
- .2 Asrama
- .3 Uang Makan
- .4 Uang Transport
- .5 Uang Buku
- .6 Uang Ujian
- .7 Uang Semester/Uang Kuliah
- .8 Uang Saku

899 Sarana Pendidikan
- .1 Bantuan Sarana Belajar
- .2 Bantuan Alat Tulis
- .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya

900 KEUANGAN

901 Nota Keuangan

902 APBN

903 APBD

904 Dana Alokasi Umum

905 Dana Alokasi Khusus

910 ANGGARAN

.1 Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.2 Keputusan Gubernur ttg Penunjukkan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat teknis BLUD

913 Anggaran Belanja Tambahan

914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)

.1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)

915 Daftar Isian Proyek (DIP)

.1 Daftar Usulan Proyek (DUP)

.2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)

916 Revisi Anggaran

920 OTORISASI/SKO

921 Rutin

922 Pembangunan

923 SUP

924 Ralat SKO

930 VERIFIKASI

931 SPM Rutin

932 SPM Pembangunan

933 Penerimaan

934 SPJ Rutin

935 SPJ Pembangunan

936 Nota Pemeriksaan

937 SP Pemindahan Pembukuan

940 PEMBUKUAN

941 Penyusunan Perhitungan Anggaran

942 Permintaan Data Anggaran, Laporan Fisik Pembangunan

950 PERBENDAHARAAN

951 Tuntutan Ganti Rugi

952 Tuntutan Bendaharawan

953 Penghapusan Kekayaan Negara

954 Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan

955 Specimen Tanda Tangan

956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan

960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

961 Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas

962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan

963 Laporan Keuangan Bendaharawan

970 PENDAPATAN

971 Perimbangan Keuangan

972 Subsidi

973 Pajak, Ipeda, IHH, IHPH

974 Retribusai

975 Bea

976 Cukai

977 Pungutan

978 Bantuan Presiden, Kementrian dan Bantuan Lainnya

990 BENDAHARAWAN

991 SKPP/SPP

992 Teguran SPJ

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001